



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB II**

### **TELAAH LITERATUR**

#### **2.1 Laporan Keuangan**

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), 2018), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

- a. Aset;
- b. Liabilitas;
- c. Ekuitas;
- d. Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian;
- e. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan;
- f. Arus kas.

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya arus kas masa depan.

Berdasarkan PSAK No. 1 (IAI, 2018), komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode

Laporan posisi keuangan mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut:

- a. Aset tetap;
- b. Properti investasi;
- c. Aset tak berwujud;
- d. Aset keuangan;
- e. Investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;
- f. Aset biologis;
- g. Persediaan;
- h. Piutang usaha dan piutang lain;
- i. Kas dan setara kas;
- j. Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual;
- k. Utang usaha dan utang lain;
- l. Provisi;
- m. Liabilitas keuangan;

- n. Liabilitas dan aset untuk pajak kini;
  - o. Liabilitas dan aset pajak tangguhan;
  - p. Liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual;
  - q. Kepentingan nonpengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas;
  - r. Modal saham cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
- Bagian laba rugi atau laporan laba rugi mencakup pos-pos yang menyajikan jumlah berikut untuk periode: pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, jumlah tunggal untuk operasi yang dihentikan. Bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah selama periode: pos-pos penghasilan komprehensif lain yang diklasifikasikan berdasarkan sifat dan dikelompokkan sesuai SAK: tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode
- Laporan perubahan ekuitas mencakup informasi sebagai berikut:
- a. Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali;

- b. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif;
  - c. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian.
4. Laporan arus kas selama periode
- Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain
- Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan keuangan, dan menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau

membantu penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya.

Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (IAI, 2018), terdapat dua karakteristik kualitatif fundamental yang membuat informasi dalam laporan keuangan menjadi berguna, yaitu:

1. Relevansi

Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi mungkin mampu membuat perbedaan dalam keputusan bahkan jika sebagian pengguna memilih untuk tidak mengambil keuntungan atas informasi tersebut atau telah menyadari informasi tersebut dari sumber lainnya. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam keputusan jika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmatori, atau keduanya. Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai input yang digunakan oleh pengguna memprediksi hasil (*outcome*) masa depan. Sedangkan informasi keuangan memiliki nilai konfirmatori jika menyediakan umpan balik (mengkonfirmasi atau mengubah) tentang evaluasi sebelumnya.

2. Representasi tepat

Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomik dalam kata dan angka. Agar dapat menjadi informasi yang berguna, selain merepresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus merepresentasikan secara tepat fenomena yang harus direpresentasikan. Agar dapat menunjukkan representasi tepat dengan sempurna, tiga karakteristik harus

dimiliki yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Sebuah penjabaran lengkap mencakup seluruh informasi yang diperlukan pengguna agar dapat memahami fenomena yang digambarkan, termasuk seluruh deskripsi dan penjelasan yang diperlukan. Sebuah penjabaran yang netral adalah tanpa bias dalam pemilihan atau penyajian informasi keuangan. Penjabaran netral tidak diarahkan, dibobotkan, ditekankan, ditekankan kembali, atau dengan kata lain dimanipulasi untuk meningkatkan kemungkinan bahwa informasi keuangan akan diterima lebih baik atau tidak baik oleh pengguna. Sedangkan bebas dari kesalahan berarti tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam mendeskripsikan fenomena, dan proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang dilaporkan telah dipilih dan diterapkan tanpa ada kesalahan dalam prosesnya.

Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (IAI, 2018), terdapat empat karakteristik kualitatif yang meningkatkan kegunaan informasi yang relevan dan direpresentasikan secara tepat, yaitu:

a. Keterbandingan

Karakteristik kualitatif yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dalam, dan perbedaan antara, pos-pos. Berbeda dengan karakteristik kualitatif lainnya, keterbandingan tidak berhubungan dengan satu pos. Sebuah perbandingan mensyaratkan paling tidak dua pos.

b. Keterverifikasian

Keterverifikasian membantu meyakinkan bahwa informasi merepresentasikan fenomena ekonomik secara tepat sebagaimana mestinya. Keterverifikasian

berarti bahwa berbagai pengamat independen dengan pengetahuan berbeda-beda dapat mencapai konsensus, meskipun tidak selalu mencapai kesepakatan, bahwa penggambaran tertentu merupakan representasi tepat.

c. Ketepatanwaktuan

Ketepatanwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Secara umum, semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang berguna informasi tersebut.

d. Keterpahaman

Pengklasifikasian, pengarakteristikan, dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas dapat membuat informasi tersebut terpaham.

Pengguna laporan keuangan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu (Weygandt *et al*, 2015):

- a. Pengguna internal, yaitu manajer yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan bisnis, termasuk manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, dan karyawan perusahaan.
- b. Pengguna eksternal, yaitu individu dan organisasi di luar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan perusahaan. Investor (pemilik) menggunakan informasi akuntansi untuk membuat keputusan untuk membeli, menahan, atau menjual kepemilikan saham perusahaan. Kreditur (seperti pemasok dan bank) menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi risiko menyetujui kredit atau meminjamkan uang.



## 2.2 Audit

*Auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen (Arens *et al*, 2017). *Auditing* memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan laporan arus kas (Agoes, 2017). Berdasarkan Standar Audit (SA) 200 (Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 2016), tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju.

Audit juga memiliki beberapa manfaat sebagai berikut (Ardianingsih, 2018):

- a. Akses ke pasar modal.
- b. Biaya modal menjadi lebih rendah.
- c. Pencegah terjadinya ketidakefisienan dan kecurangan.
- d. Perbaikan dalam pengendalian dan operasional.

Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan. Asersi manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan besar berikut ini (Mulyadi, 2017):

a. Keberadaan atau keterjadian (*existence or occurrence*)

Berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu.

b. Kelengkapan (*completeness*)

Berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan.

c. Hak dan kewajiban (*right and obligation*)

Berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak perusahaan dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu.

d. Penilaian (*valuation*) atau alokasi

Berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.

e. Penyajian dan pengungkapan (*presentation and disclosure*)

Berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya.

Menurut Agoes (2017), standar *auditing* berbeda dengan prosedur *auditing*. “Prosedur” berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan “standar” berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Terdapat 6 kategori Standar Audit (SA) yang ditetapkan oleh IAPI tahun 2016, yaitu:

1. Prinsip Umum dan Tanggung Jawab
  - a. SA 200, “Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit”
  - b. SA 210, “Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit”
  - c. SA 220, “Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan”
  - d. SA 230, “Dokumentasi Audit”
  - e. SA 240, “Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan”
  - f. SA 250, “Pertimbangan atas Peraturan Perundang-Undangan dalam Audit Laporan Keuangan”
  - g. SA 260, “Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola”
  - h. SA 265, “Pengomunikasian Defisiensi dalam Pengendalian Internal kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola dan Manajemen”
2. Penilaian Risiko dan Respons Terhadap Risiko yang Dinilai
  - a. SA 300, “Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan”
  - b. SA 315, “Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya”
  - c. SA 320, “Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit”
  - d. SA 330, “Respons Auditor terhadap Risiko yang Telah Dinilai”
  - e. SA 402, “Pertimbangan Audit terkait dengan Entitas yang Menggunakan Suatu Organisasi Jasa”

- f. SA 450, “Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi Selama Audit”
3. Bukti Audit
- a. SA 500, “Bukti Audit”
  - b. SA 501, “Bukti Audit – Pertimbangan Spesifik atas Unsur Pilihan”
  - c. SA 505, “Konfirmarsi Eksternal”
  - d. SA 510, “Perikatan Audit Tahun Pertama – Saldo Awal”
  - e. SA 520, “Prosedur Analitis”
  - f. SA 530, “*Sampling* Audit”
  - g. SA 540, “Audit atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar, dan Pengungkapan yang Bersangkutan”
  - h. SA 550, “Pihak Berelasi”
  - i. SA 560, “Peristiwa Kemudian”
  - j. SA 570, “Kelangsungan Usaha”
  - k. SA 580, “Representasi Tertulis”
4. Penggunaan Hasil Pekerjaan Pihak Lain
- a. SA 600, “Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan Grup (Termasuk Pekerjaan Auditor Komponen)”
  - b. SA 610, “Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal”
  - c. SA 620, “Penggunaan Pekerjaan Seorang Pakar Auditor”
5. Kesimpulan Auditor dan Pelaporan
- a. SA 700, “Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan”

- b. SA 705, “Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Audit Independen”
  - c. SA 706, “Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain dalam Laporan Auditor Independen”
  - d. SA 710, “Informasi Komparatif – Angka Koresponding dan Laporan Keuangan Komparatif”
  - e. SA 720, “Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditan”
6. Area Khusus
- a. SA 800, “Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai dengan Kerangka Bertujuan Khusus”
  - b. SA 805, “Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan Tunggal dan Suatu Unsur, Akun, atau Pos Tertentu dalam Laporan Keuangan”
  - c. SA 810, “Perikatan untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan”

Standar audit mengharuskan auditor untuk memperoleh pemahaman dari masing-masing lima komponen pengendalian internal untuk merencanakan audit. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang rancangan pengendalian yang relevan dan apakah pengendalian telah ditempatkan dalam operasi oleh entitas. Auditor menggunakan pengetahuan ini untuk (Messier *et al*, 2014):

- a. Mengidentifikasi jenis potensi salah saji.
- b. Menentukan faktor-faktor yang memengaruhi risiko salah saji material.
- c. Merancang pengujian pengendalian dan prosedur substantif.

Lima komponen pengendalian internal sebagaimana didefinisikan oleh kerangka kerja *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*, yaitu (Arens *et al*, 2017):

a. Lingkungan pengendalian (*control environment*)

Terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang secara keseluruhan mencakup sikap manajemen puncak, dewan direksi, dan pemilik entitas mengenai pengendalian internal dan kepentingan entitas tersebut.

b. Penilaian risiko (*risk assessment*)

Penilaian risiko adalah proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat mencegah pencapaian tujuan entitas.

c. Aktivitas pengendalian (*control activities*)

Kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil untuk pencapaian tujuan entitas.

d. Informasi dan komunikasi (*information and communication*)

Tujuan dari informasi akuntansi dan sistem komunikasi entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas, serta menjaga akuntabilitas atas aset.

e. Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan berkaitan dengan penilaian berkelanjutan atau berkala dari kualitas pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian berjalan sebagaimana dimaksud dan merancang ulang apabila terdapat perubahan kondisi.

Auditor harus memperoleh bukti audit yang tepat untuk mendukung semua asersi manajemen dalam laporan keuangan. Untuk melakukan ini, auditor mengikuti proses audit yang merupakan metodologi dalam mengatur audit untuk memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan cukup dan sesuai serta tujuan audit terpenuhi. Terdapat empat tahapan utama dari proses audit, yaitu (Arens *et al*, 2017):

1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit

Dalam tahapan ini terdapat tiga aspek kunci, yaitu memperoleh pemahaman mengenai entitas dan lingkungannya, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, dan menilai risiko salah saji.

Program audit adalah daftar prosedur audit untuk area audit atau keseluruhan audit. Prosedur audit merupakan instruksi terperinci yang menjelaskan bukti audit yang akan diperoleh selama audit. Terdapat delapan tipe bukti audit, yaitu:

- a. Pemeriksaan fisik (*physical examination*)

Inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aset berwujud (*tangible asset*). Jenis bukti ini sering berkaitan dengan persediaan dan kas, tetapi dapat pula diterapkan untuk berbagai verifikasi atas sekuritas, wesel tagih, serta aset tetap berwujud.

- b. Konfirmasi (*confirmation*)

Menggambarkan penerimaan tanggapan baik secara tertulis langsung dari pihak ketiga yang memverifikasikan keakuratan informasi sebagaimana yang diminta oleh auditor. Permintaan ini ditujukan bagi klien, dan klien

meminta pihak ketiga untuk memberikan tanggapannya secara langsung kepada auditor.

c. Inspeksi (*inspection*)

Pemeriksaan auditor atas dokumen dan catatan klien untuk memperkuat informasi yang atau harus, termasuk dalam laporan keuangan.

d. Prosedur analitis (*analytical procedures*)

Didefinisikan oleh standar audit sebagai evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan *non*-keuangan. Tujuan prosedur analitis yaitu digunakan untuk memahami industri dan bisnis klien, menilai kemampuan keberlanjutan entitas, menunjukkan adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan, dan memberikan bukti yang mendukung saldo akun.

e. Wawancara dengan klien (*inquiries of the client*)

Memperoleh informasi secara tertulis maupun lisan dari klien dalam menanggapi pertanyaan dari auditor.

f. Penghitungan ulang (*recalculation*)

Melibatkan pengecekan kembali sampel perhitungan yang dilakukan oleh klien.

g. Pelaksanaan ulang (*reperformance*)

Pengujian independen auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang pada awalnya dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal entitas.



h. Observasi (*observation*)

Melihat suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh pihak lain.

2. Melaksanakan pengujian pengendalian (*tests of control*) dan pengujian substantif atas transaksi (*substantive tests of transaction*).

Sebelum auditor memutuskan untuk mengurangi penilaian auditor atas risiko pengendalian yang direncanakan apabila pengendalian internal dianggap efektif, auditor harus menguji keefektifan pengendalian tersebut. Prosedur pengujian tersebut disebut dengan pengujian pengendalian (*tests of control*).

Auditor juga harus mengevaluasi pencatatan transaksi klien dengan memverifikasi jumlah moneter transaksi tersebut, proses tersebut disebut dengan pengujian substantif atas transaksi (*substantive tests of transaction*).

3. Melakukan prosedur analitis substantif (*substantive analytical procedures*) dan pengujian rincian saldo (*tests of detail of balances*).

Terdapat dua kategori umum dalam prosedur ini. Prosedur analitis terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non keuangan. Ketika prosedur analitis digunakan sebagai bukti untuk memberikan jaminan tentang saldo akun maka disebut prosedur analitis substantif (*substantive analytical procedures*). Pengujian rincian saldo (*tests of detail of balances*) merupakan prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah saji moneter pada saldo-saldo dalam laporan keuangan. Pengujian atas rincian saldo akhir merupakan hal yang penting karena sebagian besar bukti diperoleh dari pihak ketiga dan dianggap berkualitas tinggi.

#### 4. Melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit.

Setelah auditor menyelesaikan semua prosedur untuk setiap tujuan audit dan akun laporan keuangan serta pengungkapan yang terkait, maka diperlukan waktu untuk menggabungkan semua informasi yang diperoleh untuk membuat kesimpulan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar. Laporan audit merupakan tahap terakhir dalam seluruh proses audit. Opini audit adalah pernyataan standar dari kesimpulan auditor yang didapatkan berdasarkan kesimpulan dari proses audit.

### **2.3    *Audit Delay***

*Audit delay* adalah periode waktu antara tanggal tahun fiskal laporan keuangan dan penandatanganan laporan audit independen mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan auditor. *Audit delay* merupakan jarak antara waktu laporan keuangan sampai tanggal auditor mengeluarkan laporan auditnya. *Audit delay* merupakan rentang waktu untuk menyelesaikan suatu laporan audit atas laporan keuangan, yang diukur dari penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit (Diana, 2017).

Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Perbedaan waktu ini dalam audit sering dinamai dengan *audit delay* (Karyadi, 2017). Lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor dilihat dari interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan

sampai tanggal laporan auditor ditandatangani. Perbedaan waktu ini disebut dengan *audit delay* atau disebut juga dengan *audit report lag* (Prameswari dan Yustrianthe, 2015). Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin lama pula *audit delay*-nya. Jika *audit delay* semakin lama, maka kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan semakin besar (Prameswari dan Yustrianthe, 2015). Keterlambatan publikasi laporan keuangan dapat mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit (Putri dan Asyik, 2015).

Proses audit memerlukan waktu yang tidak sebentar. Dibutuhkan beberapa prosedur untuk memenuhi standar yang berlaku. Selama proses audit, auditor tak jarang mengalami berbagai kendala yang berdampak pada lama penyelesaian audit sehingga laporan audit mengalami *delay* (Firanty dan Syam, 2015). Auditor harus memodifikasi strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit yang dibutuhkan jika kondisi berubah secara signifikan selama audit. Langkah-langkah tambahan yang harus dilakukan, di antaranya (Messier *et al*, 2014):

- a. Menilai risiko bisnis
- b. Menetapkan materialitas
- c. Mempertimbangkan banyaknya lokasi
- d. Menilai kebutuhan spesialis
- e. Menilai kemungkinan tindakan ilegal
- f. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait
- g. Mempertimbangkan tambahan jasa yang bernilai tambah

Evaluasi hasil audit laporan keuangan utamanya mengulas dua isu: (1) kecukupan bukti audit, dan (2) dampak salah saji yang terdeteksi dalam laporan keuangan. Dalam mengevaluasi bukti audit, auditor menentukan apakah ada bukti yang memadai untuk mendukung tiap asersi yang relevan. Evaluasi ini mempertimbangkan bukti yang diperoleh untuk mendukung penilaian risiko salah saji material, sebagaimana bukti yang dikumpulkan untuk mencapai level rencana risiko deteksi (prosedur substantif). Jika evaluasi ini mengindikasikan bahwa bukti tidak cukup untuk memenuhi level rencana dan risiko audit, auditor mungkin perlu mengumpulkan bukti tambahan (Messier *et al*, 214).

Adanya keterlambatan informasi di dalam laporan keuangan akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Informasi laba yang dihasilkan perusahaan menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor, artinya informasi yang dipublikasikan tersebut akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham (Putri dan Asyik, 2015).

*Audit delay* diukur secara kuantitatif dalam jumlah hari. *Audit delay* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Arifianto dan Riduwan, 2017):

$$\text{Audit Delay} = \text{Tanggal Laporan Auditor} - \text{Tanggal Tutup Buku}$$

Keterangan:

*Audit Delay* : lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku yaitu per 31 Desember hingga diterbitkannya laporan auditor independen.

Tanggal Laporan Auditor : tanggal diterbitkannya laporan auditor.

Tanggal Tutup Buku : tanggal penutupan tahun buku, yaitu 31 Desember.

Laporan audit terbagi menjadi delapan bagian, yaitu (Arens *et al*, 2017):

1. Judul laporan (*report title*)

Standar pemeriksaan mengharuskan bahwa laporan keuangan hasil pemeriksaan untuk memiliki judul dan judul laporan tersebut harus bertuliskan independen, yang berarti bahwa laporan keuangan audit disajikan secara wajar tidak memihak pada pihak berkepentingan tertentu.

2. Alamat laporan audit (*audit report address*)

Laporan ditujukan kepada pihak yang telah disiapkan laporannya, termasuk perusahaan, pemegang saham, atau dewan direksi.

3. Paragraf pengantar (*introductory paragraph*)

Paragraf pertama dari laporan pemeriksaan menyatakan bahwa KAP telah melakukan audit dan bahwa laporan keuangan telah diperiksa termasuk tanggal pada catatan atas laporan keuangan, tanggal neraca, periode akuntansi atas laporan akuntansi, serta laporan arus kas.

4. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan (*management's responsibility*)

Pada paragraf ini dinyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab dari manajemen, tanggung jawab yang dimaksudkan termasuk dalam menetapkan standar dalam pembuatan laporan keuangan, memelihara pengendalian internal perusahaan terhadap pembuatan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material dikarenakan *fraud* atau *error*.

5. Tanggung jawab auditor (*auditor responsibility*)

Tanggung jawab auditor terbagi menjadi tiga paragraf. Paragraf pertama menyatakan bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit. Audit dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji yang material. Paragraf kedua menjelaskan bahwa prosedur yang dilakukan berdasarkan penilaian auditor termasuk dalam penilaian risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Paragraf ketiga menjelaskan bahwa pengumpulan bukti, auditor yakin bahwa bukti yang dikumpulkan telah mendukung pendapat auditor.

6. Paragraf opini (*opinion paragraph*)

Pada bagian ini auditor memberikan pernyataan atas kesimpulan dari keseluruhan audit yang dilaksanakan, pendapat dibuat berdasarkan pertimbangan profesional.

7. Tanda tangan dan alamat KAP (*signature and address of CPA firm*)

Mengidentifikasi kantor akuntan atau *partner* yang bertanggung jawab atas pelaksanaan audit tersebut.

#### 8. Tanggal pelaporan (*audit report date*)

Tanggal auditor menyelesaikan prosedur audit yang diperlukan untuk mendapatkan bukti audit yang sesuai dan memadai.

Perusahaan kecil dan besar menyiapkan laporan keuangan secara berkala untuk menilai kondisi keuangan dan hasil operasi. Periode waktu akuntansi jangka umumnya sebulan, kuartal, atau setahun. Periode waktu bulanan dan triwulanan disebut periode interim. Sebagian besar perusahaan besar harus menyiapkan laporan keuangan triwulanan dan tahunan. Periode waktu akuntansi yang panjangnya satu tahun disebut dengan tahun fiskal. Fiskal biasanya dimulai dengan hari pertama dalam sebulan dan berakhir 12 bulan kemudian pada tanggal hari terakhir dalam sebulan (Weygandt *et al*, 2015). Tahun fiskal perusahaan berakhir pada tanggal 31 Desember. Semua tahun fiskal yang disajikan meliputi 52 minggu dari operasi (Fraser dan Ormiston, 2016). Banyak perusahaan menggunakan tahun kalender (1 Januari hingga 31 Desember) sebagai periode akuntansinya (Weygandt *et al*, 2015).

## **2.4 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, *log size*, nilai saham, dan lain sebagainya (Arifianto dan Riduwan, 2017). Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan

sebagainya. Semakin besar nilai *item-item* tersebut maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat (Suginam, 2016).

Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah total aset dari perusahaan tersebut (Putri dan Asyik, 2015). Total aset yang digambarkan dalam ukuran perusahaan akan menunjukkan seberapa besar perusahaan itu. Semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar ukuran perusahaan (Syachrudin dan Nurlis, 2018).

Perusahaan besar memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil (Gunawan *et al*, 2015). Secara umum, perusahaan yang memiliki total aset yang relatif besar dapat beroperasi dengan tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset yang lebih rendah. Perusahaan dengan total aset yang memadai relatif lebih stabil dan lebih mampu mengolah total aset yang dimilikinya (Shinta dan Laksito, 2014). Perusahaan besar, dengan sumber dayanya yang mencukupi dapat mempekerjakan karyawan dengan kompetensi yang lebih baik, perusahaan juga dapat menyediakan teknologi dan sistem yang lebih mendukung untuk memudahkan pekerjaannya (Sitorus dan Ardiati, 2017). Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka kecenderungan menggunakan modal asing juga semakin besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar membutuhkan dana yang besar pula untuk menunjang operasionalnya, dan salah satu alternatif pemenuhannya adalah



dengan modal asing apabila modal sendiri tidak mencukupi (Sudarsono dan Sudiyatno, 2016).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 53/POJK.04/2017 (<https://www.ojk.go.id/>), ukuran perusahaan dikategorikan sebagai berikut:

1. Emiten skala kecil

Badan hukum yang memiliki total aset tidak lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

2. Emiten skala menengah

Badan hukum yang memiliki total aset lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

3. Emiten skala besar

Badan hukum yang memiliki total aset lebih dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diproksikan dengan logaritma natural total aset. Rumus untuk menghitung Ukuran Perusahaan menurut Arifianto dan Riduwan (2017) adalah:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Assets}$$

Keterangan:

$\text{Ln Total Assets}$  : Logaritma natural total aset

Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (IAI, 2018), aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas. Manfaat ekonomik masa depan aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan, baik langsung maupun tidak langsung, pada arus kas dan setara kas kepada entitas. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional entitas. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat dikonversikan menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya produksi akibat penggunaan proses produksi alternatif.

Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (IAI, 2018), aset diakui dalam laporan posisi keuangan jika kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomik masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonomiknya dipandang tidak mungkin mengalir ke entitas setelah periode akuntansi berjalan. Dengan demikian, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laba rugi. Dasar pengukuran yang lazimnya digunakan entitas dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Aset dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Menurut Kieso *et al* (2018), aset dikelompokkan menjadi dua, yaitu aset lancar (*current assets*) dan aset tidak lancar (*non-current assets*).

Menurut Kieso *et al* (2018), *current assets* merupakan kas dan aset lain perusahaan yang diharapkan dapat dikonversi menjadi uang tunai, dijual, atau digunakan dalam satu tahun atau dalam siklus operasi perusahaan, seperti *cash*, *short-term investment*, *prepaid expenses*, *receivables*, dan *inventories*. *Cash* merupakan aset yang paling *likuid* yang dapat berupa koin, cek serta rekening bank milik perusahaan. Pada *short-term investment*, perusahaan harus melaporkan sekuritas perdagangan (utang atau ekuitas) sebagai aset lancar, dan semua perdagangan efek dilaporkan pada nilai wajar. *Prepaid expenses* adalah biaya yang sudah dibayar tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. *Receivables* adalah klaim yang dimiliki perusahaan terhadap pelanggan untuk barang atau jasa yang telah diberikan perusahaan. *Inventories* adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual.

Menurut Kieso *et al* (2018), aset tidak lancar (*non-current assets*) merupakan aset yang tidak memenuhi definisi dari aset lancar (*current assets*), seperti *others assets*, *intangible assets*, *property, plant* dan *equipment*, dan *long-term investments*. *Others assets* memiliki banyak macam seperti biaya dibayar dimuka jangka panjang (*long-term prepaid expense*) dan piutang tidak lancar (*non-current receivables*). *Item* lain yang termasuk seperti aset dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual, dan kas atau surat berharga yang terbatas (*restricted cash or securities*). *Intangible assets* adalah aset yang tidak memiliki wujud fisik dan bukan instrument keuangan, termasuk paten, hak cipta,

*franchises, goodwill, trademarks, trade names, dan customer list. Property, plant dan equipment* adalah aset berwujud yang memiliki jangka waktu panjang yang digunakan dalam operasi bisnis, termasuk *physical property* seperti tanah, bangunan, mesin, *furniture*, alat, dan *wasting resources*. *Long-term investments* sering disebut investasi yang normalnya memiliki satu kondisi dari empat tipe sebagai berikut:

- a. Investasi pada saham seperti obligasi, saham biasa atau wesel jangka panjang.
- b. Investasi pada aset berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasi, seperti tanah untuk spekulasi.
- c. Investasi yang disisihkan untuk dana khusus, seperti dana cadangan, dana pensiun, atau dana ekspansi pabrik.
- d. Investasi pada anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi atau perusahaan asosiasi.

## **2.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay***

Perusahaan yang mempunyai total aktiva yang besar tentunya memiliki sumber daya yang besar, sistem informasi yang canggih dan memiliki lebih banyak staf akuntansi serta memiliki sistem pengendalian internal yang kuat (Zebriyanti dan Subardjo, 2016). Semakin besar perusahaan, maka perusahaan itu memiliki sistem pengendalian internal yang baik, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, dan memudahkan auditor dalam melakukan pengauditan atas laporan keuangan (Putri dan Asyik, 2015). Selain itu perusahaan

yang memiliki aset besar akan cenderung menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan yang memiliki aset kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki aset besar akan mendapat pengawasan lebih ketat dari investor, regulator, dan sorotan masyarakat sehingga perusahaan besar akan cenderung mempercepat pelaporan laporan keuangan auditnya ke publik (Arifianto dan Riduwan, 2017). Oleh karena itu, semakin besar total aset maka akan semakin pendek *audit delay* (Putri dan Asyik, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian Arifianto dan Riduwan (2017), Zebriyanti dan Subardjo (2016), Apriyana dan Rahmawati (2017), Rahmawati dan Suryono (2016), dan Soedarsa dan Nurdiawansyah (2017) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan hasil penelitian Karang, Yandyana dan Ramantha (2015) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Penelitian Diana (2017) juga menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian Suginam (2016), Prameswari dan Yustrianthe (2015), Wiryakriyana dan Widhiyani (2017), Putri dan Asyik (2015), Syachrudin dan Nurlis (2018), dan Rubianto (2017) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis alternatif terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* adalah:

Ha<sub>1</sub>: Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total aset berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

## 2.6 Profitabilitas

Rasio profitabilitas mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi suatu perusahaan untuk periode waktu tertentu (Weygandt *et al*, 2015). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, dan jumlah karyawan, dan sebagainya. Rasio profitabilitas yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham yang tertentu (Prameswari dan Yustrianthe, 2015). Rasio profitabilitas ini dapat diartikan sejauh mana keefektifan dari keseluruhan manajemen dalam menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Profitabilitas merupakan hasil dari sejumlah besar kebijakan dan keputusan manajemen dalam menggunakan sumber-sumber dana perusahaan (Rahmawati dan Suryono, 2015).

Menurut Suginam (2016), profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Dasar penilaian profitabilitas adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan rugi-laba perusahaan. Berdasarkan kedua laporan keuangan tersebut akan dapat ditentukan hasil analisis sejumlah rasio dan selanjutnya rasio ini digunakan untuk menilai beberapa aspek tertentu dari operasi perusahaan. Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset, maupun modal sendiri. Jadi hasil profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen ditinjau dari keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan.

Dalam penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan rasio *Return on Assets (ROA)*. *ROA* menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva (Prameswari dan Yustrianthe, 2015). *ROA* adalah tingkat pengembalian yang dicapai perusahaan melalui penggunaan asetnya, yang didapat dengan perhitungan *net income* dibagi rata-rata total aset (Kieso *et al*, 2018). Menurut Sudarsono dan Sudyatno (2016), semakin besar *ROA* suatu perusahaan maka semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset. Semakin besar nilai dari *ROA* itu berarti bahwa semakin baik perusahaan menggunakan asetnya untuk mendapat laba, dengan meningkatnya nilai *ROA*, profitabilitas dari perusahaan semakin meningkat (Basalama *et al*, 2017). Perusahaan sektor manufaktur membeli bahan baku dan komponen kemudian mengubahnya menjadi barang jadi. Perusahaan-perusahaan ini biasanya memiliki satu atau lebih dari tiga jenis *inventory* berikut (Datar dan Rajan, 2015):

1. *Direct material inventory*

Bahan baku dalam persediaan yang akan digunakan dalam proses produksi.

2. *Work-in-process inventory*

Barang-barang yang sedang dikerjakan tetapi belum sepenuhnya selesai.

*Inventory* jenis ini disebut juga *work in progress*.

3. *Finished-goods inventory*

Barang yang sepenuhnya telah selesai diproduksi tetapi belum terjual.

Alasan pemilihan *ROA* digunakan untuk mengukur profitabilitas, yaitu (Prameswari dan Yustrianthe, 2015):

- a. Sifatnya yang menyeluruh dapat digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal, efisiensi produk, dan efisien penjualan.
- b. Apabila perusahaan mempunyai data industri, *ROA* dapat digunakan untuk mengukur rasio industri sehingga dapat dibandingkan dengan perusahaan lain.
- c. *ROA* dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
- d. *ROA* dapat digunakan untuk mengukur efisiensi kinerja masing-masing divisi.
- e. *ROA* dapat digunakan sebagai kontrol dan fungsi perencanaan.

Rumus untuk menghitung *Return on Assets (ROA)* menurut Weygandt *et al* (2015) adalah:

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Total Assets}}$$

Keterangan:

*ROA* : rasio yang mengukur profitabilitas secara keseluruhan.

*Net income* : laba bersih tahun berjalan.

*Average total assets* : rata-rata total aset yang dimiliki perusahaan.

Menurut Kieso *et al* (2018), *net income* merupakan hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. *Net income* merupakan laba



setelah semua pendapatan dan beban untuk suatu periode yang dipertimbangkan. Hal ini dipandang penting oleh banyak orang sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan PSAK No. 1 (IAI, 2018), laba tahun berjalan (*net income*) disajikan dalam laporan laba rugi. Laba tahun berjalan diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan sehingga menghasilkan laba bruto. Laba bruto ditambah dengan penghasilan lain serta dikurangi dengan biaya distribusi, beban administrasi, beban lain-lain, biaya pendanaan, dan bagian laba entitas asosiasi sehingga menghasilkan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan sehingga menghasilkan laba tahun berjalan.

Berdasarkan PSAK No. 19 (IAI, 2018), aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut diperkirakan mengalir ke entitas. Menurut Weygandt *et al* (2015), total aset terdiri dari *current assets*, *long-term investments*, *property, plant, and equipment*, dan *intangible assets* yang disajikan dalam *statement of financial position*. *Current assets* adalah aset yang perusahaan harapkan dapat dikonversi menjadi uang tunai atau digunakan dalam waktu satu tahun, seperti *prepaid expenses*, *inventories*, *receivables*, *short-term investment*, dan *cash*.

Menurut Weygandt *et al* (2015), *prepaid expenses* adalah biaya yang telah dibayar tunai sebelum digunakan atau dikonsumsi. Berdasarkan PSAK No. 14 (IAI, 2018), persediaan adalah aset tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dalam bentuk bahan atau

perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Menurut Weygandt *et al* (2015), *recevables* adalah klaim yang diperkirakan akan ditagih secara tunai, diklasifikasikan menjadi (1) *accounts receivable* yaitu jumlah yang harus dibayar pelanggan yang dihasilkan dari penjualan barang dan jasa, (2) *notes receivable* yaitu perjanjian tertulis (sebagaimana dibuktikan dengan instrumen formal) untuk jumlah yang akan diterima, dan biasanya terdapat bunga dan lebih panjang untuk periode waktu 60-90 hari atau lebih lama, (3) *other receivables* termasuk *non-trade receivables* seperti *interest receivable*, pinjaman kepada pejabat perusahaan, uang muka kepada karyawan, dan *income taxes refundable* yang umumnya bukan hasil dari operasi bisnis sehingga umumnya diklasifikasikan dan dilaporkan secara terpisah pos-pos dalam laporan posisi keuangan. *Short-term investment* merupakan surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan yang (1) siap dipasarkan dan (2) dimaksudkan untuk dikonversi menjadi uang tunai pada tahun berikutnya atau siklus operasi. *Cash* merupakan uang tunai yang terdiri dari koin, uang kertas, cek, wesel, dan uang di tangan atau di deposito di bank atau penyimpanan sejenis. Berdasarkan PSAK No. 2 (IAI, 2018), kas terdiri atas saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro (*demand deposits*). Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Menurut Weygandt *et al* (2015), *long-term investments* umumnya investasi berupa saham biasa dan obligasi perusahaan lain yang biasanya dipegang selama

bertahun-tahun dan aset tidak lancar seperti tanah atau bangunan yang tidak digunakan perusahaan dalam aktivitas operasinya. *Property, plant, and equipment* adalah aset dengan masa manfaat yang relatif panjang yang saat ini digunakan perusahaan dalam mengoperasikan bisnisnya, seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Berdasarkan PSAK No. 16 (IAI, 2018), aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Berdasarkan PSAK No. 19 (IAI, 2018), aset takberwujud adalah aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Menurut Weygandt *et al* (2015), *intangible assets* yaitu hak, hak istimewa, dan keunggulan kompetitif yang dihasilkan dari kepemilikan aset jangka panjang yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti *patent, copyright, trademark, franchises* dan *licenses*, serta *goodwill*. Berdasarkan PSAK No. 19 (IAI, 2018), *goodwill* yang dihasilkan secara internal tidak diakui sebagai aset karena *goodwill* tersebut bukan merupakan suatu sumber daya teridentifikasi (tidak dapat dipisahkan dan tidak timbul dari hak kontraktual atau hukum lain) yang dikendalikan oleh entitas dan dapat diukur secara andal biaya perolehannya.

## **2.7 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Audit Delay***

Profitabilitas penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan perusahaan (*going concern*) karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut

mempunyai prospek yang baik atau tidak (Zebriyanti dan Subardjo, 2016). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi rentang waktu *audit delay* akan lebih pendek dibandingkan dengan perusahaan yang tingkat profitabilitas lebih rendah (Wariyanti dan Suryono, 2017). Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi membutuhkan waktu yang lebih cepat dalam pengauditan laporan keuangan (Apriyana dan Rahmawati, 2017). Selain itu diindikasikan tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan cukup tinggi sehingga memacu perusahaan untuk mengkomunikasikan laporan keuangan yang diaudit lebih cepat (Arumsari dan Handayani, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian Arifianto dan Riduwan (2017) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Penelitian Rahmawati dan Suryono (2015), Soedarsa dan Nurdiawansyah (2017), Karang, Yandyana, dan Ramantha (2015), Arumsari dan Handayani (2017), Karyadi (2017), Palilingan (2017), dan Rubianto (2017) menyimpulkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Penelitian Syachrudin dan Nurlis (2018) dan Prameswari dan Yustrianthe (2015) juga menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian Suginam (2016), Wariyanti dan Suryono (2017), Apriyana dan Rahmawati (2017), Zebriyanti dan Subardjo (2016), serta Putri dan Asyik (2015) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis alternatif terkait pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* adalah:

Ha<sub>2</sub>: Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Assets (ROA)* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

## **2.8 Leverage**

Solvabilitas atau sering disebut rasio *leverage* adalah deskripsi kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang dalam bentuk utang jangka pendek dan/atau utang jangka panjang (Syachrudin dan Nurlis, 2018). Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan menutupi seluruh kewajiban-kewajibannya (Putri dan Asyik, 2015). Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban-kewajiban baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya (Suginam, 2016). Menurut Weygandt *et al* (2015), rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam periode jangka panjang. Dalam penelitian ini, *leverage* diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)*.

Menurut Priliyastuti dan Stella (2017), *DER* menunjukkan perbandingan utang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Sudarsono dan Sudiyatno (2016), *DER* adalah rasio yang menunjukkan persentase penyedia dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio *DER*, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Menurut Messier *et al* (2014), semakin

rendah rasio *DER*, semakin berkurang tekanan utang pada entitas. Jika rasio utang terhadap ekuitas cukup besar relatif pada industri, ini mungkin mengindikasikan bahwa entitas terlalu besar atas utang dan mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban membayar utangnya dalam jangka panjang.

Menurut Fraser dan Ormiston (2016), jumlah dan proporsi utang dalam struktur modal perusahaan sangat penting bagi analisis keuangan karena adanya *trade-off* antara risiko dan *return*. Penggunaan utang melibatkan risiko karena utang membawa komitmen tetap dalam bentuk beban bunga dan pembayaran pokok. Kegagalan untuk memenuhi biaya tetap terkait dengan utang pada akhirnya akan mengakibatkan kebangkrutan. Risiko lainnya adalah bahwa perusahaan dengan utang terlalu banyak mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan utang tambahan saat dibutuhkan atau mendapati bahwa kredit hanya tersedia dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Walaupun utang mengandung risiko, terdapat juga potensi peningkatan manfaat bagi pemilik perusahaan. Ketika utang digunakan dengan sukses (jika laba operasi lebih dari cukup untuk menutupi biaya tetap yang terkait dengan utang), *return* kepada pemegang saham diperbesar melalui *leverage* keuangan.

Rumus untuk menghitung *Debt to Equity Ratio (DER)* menurut Subramanyam (2014) adalah:

$$DER = \frac{\textit{Total liabilities}}{\textit{Shareholder's Equity}}$$

Keterangan:

*DER* : rasio yang menunjukkan perbandingan total utang dengan total ekuitas.

*Total liabilities* : total kewajiban perusahaan, baik kewajiban jangka maupun jangka pendek.

*Shareholder's equity* : total ekuitas perusahaan.

Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (IAI, 2018), liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Menurut Weygandt *et al* (2015), liabilitas terdiri dari *current liabilities* dan *non-current liabilities* yang disajikan dalam *statement of financial position*. *Current liabilities* adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasi perusahaan, seperti *account payable*, *salaries and wages payable*, *bank loans payable*, *interest payable*, dan *taxes payable*. *Non-current liabilities* adalah kewajiban yang jauh tempo lebih dari satu tahun, seperti *bonds payable*, *mortgages payable*, *long-term notes payable*, *lease liabilities*, dan *pension liabilities*.

Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (IAI, 2018), ekuitas merupakan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Menurut Kieso *et al* (2018), ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan yang tersisa setelah dikurangi seluruh liabilitas perusahaan. Ekuitas sering disebut sebagai *shareholders equity*, *stockholders equity*, atau modal

perusahaan yang disajikan dalam *statement of financial position*. Ekuitas dibagi menjadi enam bagian, yaitu:

1. *Share capital* yaitu nilai par atau *stated* dari saham yang diterbitkan. Termasuk *ordinary shares* (saham biasa) dan *preference shares* (saham preferen).
2. *Share premium* yaitu selisih dari jumlah yang dibayarkan diatas nilai par atau *stated*.
3. *Retained earnings* yaitu penghasilan perusahaan yang ditahan atau tidak dibagikan.
4. *Accumulated other comprehensive income* yaitu jumlah agregat dari *item* pendapatan komprehensif lainnya.
5. *Treasury shares* yaitu jumlah saham biasa (*ordinary shares*) yang dibeli kembali.
6. *Non-controlling interest (minority interest)* yaitu bagian dari ekuitas perusahaan anak yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor.

## **2.9 Pengaruh *Leverage* terhadap *Audit Delay***

Tingginya rasio *Total Debt To Equity* mencerminkan tingginya risiko keuangan perusahaan, dimana tingginya risiko ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban atau hutangnya baik berupa pokok maupun bunga. Risiko perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan (Rahmawati dan Suryono, 2015). Kesehatan perusahaan yang rendah akan meningkatkan kemungkinan



terjadinya kecurangan manajemen atau ketidaksengajaan untuk mengurangi karyawan. Sebagai konsekuensinya, auditor akan meningkatkan lamanya waktu dalam periode audit. Mengaudit utang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mengaudit modal. Dengan demikian, auditor akan mengaudit laporan keuangan perusahaan dengan lebih seksama dan membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga dapat meningkatkan *audit delay*. Mengaudit akun utang akan memakan waktu lama karena harus mencari sumber penyebab dari tingginya proporsi utang yang dimiliki oleh perusahaan serta membutuhkan banyak waktu dalam mengkonfirmasi pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan (Arumsari dan Handayani, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian Arifianto dan Riduwan (2017) serta penelitian Soedarsa dan Nurdiawansyah (2017) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Penelitian Wiryakriyana dan Widhiyani (2017), Putri dan Asyik (2015), Karang, Yadnyana, dan Ramantha (2015), Palilingan (2017), Apriyana dan Rahmawati (2017) serta Rubianto (2017) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Penelitian Wariyanti dan Suryono (2017) juga menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian Suginam (2016), Zebriyanti dan Subardjo (2016), Rahmawati dan Suryono (2015), Syachrudin dan Nurlis (2018), Prameswari dan Yustrianthe (2015), Arumsari dan Handayani (2017), dan Karyadi (2017) yang menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis alternatif terkait pengaruh *leverage* terhadap *audit delay* adalah:

Ha<sub>3</sub>: *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

## **2.10 Likuiditas**

Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan akan kas (Weygandt *et al*, 2015). Likuiditas merupakan rasio gambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih (Karyadi, 2017). Likuiditas mengacu pada ketersediaan sumber daya (kemampuan) jangka pendek perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi memiliki risiko yang lebih kecil terhadap kemungkinan terjadinya gagal bayar atas hutang jangka pendek perusahaan (Palilingan, 2017).

Dalam penelitian ini, likuiditas diproksikan dengan *Current Ratio (CR)*. Menurut Kieso *et al* (2018), *CR* umumnya dilaporkan jika terdapat salah satu dari dua kondisi: (1) liabilitas diharapkan diselesaikan dalam siklus operasi normal, atau; (2) liabilitas diharapkan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. *CR* diperoleh dengan cara perhitungan *current asset* dibagi *current*

*liabilities*. Rasio ini dapat memberikan sebuah ukuran likuiditas yang cepat, mudah digunakan dan mampu menjadi indikator terbaik dari sampai sejauh mana klaim dari kreditor jangka pendek telah ditutupi oleh aktiva yang diharapkan dapat diubah menjadi kas dengan cukup cepat (Suginam, 2016). Apabila *CR* rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Namun, apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena aktiva tidak digunakan sebaik mungkin. *CR* yang terlalu tinggi menunjukkan adanya kelebihan uang kas atau aktiva lancar lainnya dibandingkan dengan yang dibutuhkan sekarang (Basalama *et al*, 2017).

Menurut Subramanyam (2014), patokan *current ratio* yang sering digunakan adalah 2:1 atau lebih baik maka perusahaan baik secara finansial, sedangkan rasio di bawah 2:1 menunjukkan tingkat risiko likuiditas yang tinggi. Akan tetapi, *current ratio* yang jauh melebihi 2:1 menunjukkan sumber daya tidak digunakan secara efisien dan tingkat pengembalian yang menurun.

Menurut Subramanyam (2014), alasan *current ratio* umum digunakan untuk mengukur likuiditas karena kemampuannya dalam mengukur:

1. *Current liability coverage*

Semakin tinggi jumlah aset lancar dari kewajiban lancar, maka semakin besar jaminan bahwa kewajiban lancar akan dibayar.

2. *Buffer against losses*

Semakin besar kemampuan membayar kewajiban lancarnya, semakin rendah risiko yang ditanggung. *Current ratio* menunjukkan *margin of safety* yang tersedia untuk menutupi penyusutan nilai aset lancar non kas pada saat membuang atau melikuidasi aset lancar tersebut.

3. *Reserve of liquid funds*

*Current ratio* relevan sebagai ukuran *margin of safety* terhadap ketidakpastian dan guncangan tersebut bisa mengganggu arus kas perusahaan secara tidak terduga.

Rumus untuk menghitung *Current Ratio (CR)* menurut Weygandt *et al* (2015) adalah:

$$CR = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

Keterangan:

*CR* : rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek dengan cara perhitungan *current asset* dibagi *current liabilities*.

*Current assets* : aset lancar yang dimiliki perusahaan.

*Current liabilities* : kewajiban jangka pendek yang dimiliki perusahaan.

Menurut Warren *et al* (2017), *current assets* adalah kas dan aset lain yang diharapkan dapat dikonversi menjadi uang tunai atau dijual atau biasanya digunakan dalam satu tahun atau kurang dalam operasi bisnis. Selain kas, *current assets* termasuk *notes receivable*, *accounts receivable*, *supplies*, and *other prepaid expenses*. *Notes receivable* adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan. Pelanggan berjanji untuk membayar sejumlah uang dan bunga. *Accounts receivable* juga merupakan sejumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan, tetapi kurang formal dari *notes*. *Accounts receivable* biasanya merupakan hasil dari penyediaan layanan atau penjualan barang dagangan. *Notes receivable* dan *accounts receivable* termasuk *current assets* karena dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu satu tahun atau kurang. Dalam penyajian laporan keuangan, *current assets* disajikan dalam *statement of financial position*.

*Current liabilities* adalah liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu singkat (biasanya satu tahun atau kurang) dan yang harus dibayarkan oleh *current assets*. *Current liabilities* yang paling umum yaitu, *notes payable* dan *accounts payable* (Warren *et al*, 2017). *Notes payable* adalah perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu di masa mendatang. *Accounts payable* adalah saldo yang terutang kepada orang lain untuk barang, persediaan, atau layanan yang dibeli (Kieso *et al*, 2018). *Current liabilities* lainnya yang termasuk, yaitu *wages payable*, *interest payable*, *taxes payable*, dan *unearned fees*. Dalam penyajian laporan keuangan, *current liabilities* disajikan dalam *statement of financial position* (Warren *et al*, 2017).

## 2.11 Pengaruh Likuiditas terhadap *Audit Delay*

*Current ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Apabila perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar semakin besar, ini berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang tinggi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya (Suginam, 2016). Tingginya tingkat likuiditas perusahaan juga menggambarkan kinerja perusahaan yang baik, hal ini merupakan sebuah berita baik yang harus segera disampaikan sehingga pihak manajemen diduga lebih cepat menyampaikan laporan keuangan perusahaan kepada auditor untuk dilakukan proses auditnya sehingga akan mempersingkat *audit delay*-nya (Palilingan, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian Suginam (2016) menyimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian Palilingan (2017) menyimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian Karyadi (2017) yang menyimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis alternatif terkait pengaruh likuiditas terhadap *audit delay* adalah:

Ha<sub>4</sub>: Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio (CR)* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

## 2.12 Opini Audit

Menurut Agoes (2017), pada akhir pemeriksaannya, dalam suatu pemeriksaan umum (*general audit*), Kantor Akuntan Publik (KAP) akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri atas:

1. Lembaran opini, yang merupakan tanggung jawab akuntan publik, di mana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen.
2. Laporan keuangan, yang terdiri atas:
  - a. Laporan posisi keuangan (neraca)
  - b. Laporan laba rugi komprehensif (laporan laba rugi)
  - c. Laporan perubahan ekuitas
  - d. Laporan arus kas
  - e. Catatan atas laporan keuangan, yang antara lain berisi: bagian umum (menjelaskan latar belakang perusahaan), kebijakan akuntansi dan penjelasan aras pos-pos laporan posisi keuangan (neraca) dan laba rugi komprehensif (laba rugi)
  - f. Informasi tambahan berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang penting seperti perincian piutang, aset tetap, *liabilities*, beban umum dan administrasi serta beban penjualan.

Berdasarkan SA 700 (IAPI, 2016), laporan auditor harus dalam bentuk tertulis. Laporan auditor untuk audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit terdiri atas sepuluh bagian, yaitu:

1. Judul

Laporan auditor harus memiliki sebuah judul yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen.

2. Pihak yang Dituju

Laporan auditor harus ditujukan kepada pihak sebagaimana yang diharuskan menurut ketentuan perikatan.

3. Paragraf pendahuluan

Paragraf pendahuluan dalam laporan auditor harus:

- a. Mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit;
- b. Menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit;
- c. Mengidentifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan;
- d. Merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya; dan
- e. Menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan.

4. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Bagian dari laporan auditor ini menjelaskan tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. laporan auditor tidak perlu merujuk secara khusus pada “manajemen”, tetapi harus menggunakan istilah yang tepat dalam konteks kerangka hukum dalam yurisdiksi tertentu. Dalam beberapa yurisdiksi pengacuan yang tepat dapat menggunakan “pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.”



#### 5. Tanggung Jawab Auditor

Laporan auditor harus menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit. Laporan auditor harus menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan auditor juga harus menjelaskan bahwa standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika dan bahwa auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

#### 6. Opini auditor

Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka kepatuhan, opini auditor harus menyatakan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### 7. Tanggung Jawab Pelaporan Lainnya

Jika auditor menyatakan tanggung jawab pelaporan lainnya dalam laporan audit atas laporan keuangan yang merupakan tambahan terhadap tanggung jawab auditor berdasarkan SA untuk melaporkan laporan keuangan, maka tanggung jawab pelaporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul “Pelaporan Lain atas Ketentuan Hukum dan Regulasi,” atau judul lain yang dianggap tepat menurut isi bagian ini.

8. Tanda tangan auditor

Laporan auditor harus ditandatangani

9. Tanggal laporan audit

Laporan auditor harus diberi tanggal tidak lebih awal daripada ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor atas laporan keuangan (termasuk, bila relevan, atas informasi tambahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf, termasuk bukti bahwa):

- a. Seluruh laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan terkait, telah disusun; dan
- b. Pihak-pihak dengan wewenang yang diakui telah menyatakan bahwa mereka telah mengambil tanggungjawab atas laporan keuangan tersebut.

10. Alamat auditor

Laporan auditor harus menyebutkan lokasi dalam yurisdiksi tempat auditor berpraktik.

Opini auditor adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum (Mulyadi, 2017). Opini auditor merupakan media bagi auditor untuk mengungkapkan pendapat atas laporan keuangan kepada investor menyangkut keadaan laporan keuangan (Arumsari dan Handayani, 2017).

Berdasarkan SA 700 dan SA 705 (IAPI, 2016) terdapat dua bentuk opini audit:

1. Opini tanpa modifikasi (*unmodified opinion*)

## 2. Opini dengan modifikasian (*modified opinion*)

Berdasarkan SA 700 (IAPI, 2016), opini tanpa modifikasian diberikan jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2017).

Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil suatu organisasi, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, jika memenuhi kondisi berikut ini (Mulyadi, 2017):

- a. Prinsip akuntansi berterima umum digunakan untuk menyusun laporan keuangan.
- b. Perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dari periode ke periode telah cukup dijelaskan.
- c. Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Berdasarkan SA 700 (IAPI, 2016), auditor harus memodifikasi opini dalam laporan auditor ketika:

- a. Auditor menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material; atau
- b. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material.

Berdasarkan SA 705 (IAPI, 2016), terdapat tiga tipe modifikasi terhadap opini auditor:

1. Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika:

- a. Auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan keuangan: atau
- b. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif.

2. Opini tidak wajar (*adverse opinion*)

Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

3. Opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer opinion*)

Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif.

### **2.13 Pengaruh Opini Audit terhadap *Audit Delay***

Opini yang dihasilkan oleh auditor dapat mempengaruhi lama dari keluarnya laporan audit (Arumsari dan Handayani, 2017). Perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) akan lebih singkat *audit delay*-nya dibandingkan perusahaan yang memperoleh opini selain wajar tanpa pengecualian. Hal ini terjadi karena proses pemberian pendapat selain wajar tanpa pengecualian melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan *partner* audit yang lebih senior atau staf teknis lainnya dan perluasan lingkup audit (Arifianto dan Riduwan, 2017). Ketika perusahaan mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian, maka auditor akan mencari bukti-bukti yang menyebabkan dikeluarkannya opini selain wajar tanpa pengecualian. Pencarian bukti-bukti serta temuan-temuan audit akan memakan banyak waktu sehingga mengindikasikan terjadinya *audit delay* yang panjang (Arumsari dan Handayani, 2017). Disamping itu penerimaan opini selain *qualified* merupakan indikasi terjadinya konflik antara auditor dan perusahaan yang pada akhirnya memperpanjang *audit delay* (Soedarsa dan Nurdiawansyah, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian Karang, Yadnyana, dan Ramantha (2015), serta Palilingan (2017) menyimpulkan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Penelitian Soedarsa dan Nurdiawansyah (2017) menyimpulkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Penelitian Wariyanti dan Suryono (2017) menyimpulkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian Arifianto dan Riduwan (2017), Zebriyanti dan Subardjo (2016), Rahmawati dan Suryono (2015), Syachrudin dan Nurlis (2018), Putri dan Asyik (2015), Diana (2017), serta Arumsari dan Handayani (2017) menyimpulkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis alternatif terkait pengaruh opini audit terhadap *audit delay* adalah:

Ha<sub>5</sub>: Opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

## **2.14 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, dan Opini Audit secara simultan terhadap *Audit Delay***

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian Arifianto dan Riduwan (2017) yang melakukan pengujian atas faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* membuktikan bahwa profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, opini audit, dan kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh secara serentak terhadap *audit delay*. Hasil penelitian Arumsari dan Handayani (2017) membuktikan bahwa kepemilikan saham, profitabilitas, *leverage*, dan opini audit

berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*. Hasil penelitian Wariyanti (2017) membuktikan bahwa profitabilitas, *leverage* dan opini audit berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*. Penelitian Wiryakriyana dan Widhiyani (2017) membuktikan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, *auditor switching*, dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*. Penelitian Diana (2017) membuktikan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan opini audit berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*. Penelitian Prameswari dan Yustrianthe (2015) membuktikan bahwa ukuran perusahaan, solvabilitas, profitabilitas, dan reputasi KAP berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*.

Selain itu, penelitian Karyadi (2017) juga membuktikan bahwa likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*. Penelitian Palilingan (2017) membuktikan bahwa ukuran KAP, opini audit, profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*. Penelitian Apriyana dan Rahmawati (2017) membuktikan bahwa profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*. Penelitian Zebriyanti dan Subardjo (2016) membuktikan bahwa profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, opini audit, dan ukuran KAP berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*. Penelitian Rahmawati dan Suryono (2015) membuktikan bahwa profitabilitas, solvabilitas, kompleksitas operasi, opini audit, dan ukuran KAP berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*. Penelitian Rubianto (2017) membuktikan bahwa reputasi

perusahaan audit, profitabilitas, solvabilitas, kompleksitas operasi perusahaan, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara silmutan terhadap *audit delay*.

## 2.15 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**

